

## RINGKASAN

### PENGAWASAN BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

OLEH : MARGARETH ROBIN

Pengawasan dan pelayanan keimigrasian di dasarkan pada prinsip-prinsip selektif, yaitu hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan bangsa dan negara Republik Indonesia, serta tidak membahayakan ketertiban dan keamanan serta tidak bermusuhan bagi rakyat maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan orang asing di sini adalah orang asing baik pemegang ijin keimigrasian atau tanpa ijin keimigrasian, mulai saat masuk, berada atau akan meninggalkan Indonesia, yang melanggar atau tidak mengindahkan ketentuan. "keimigrasian Indonesia, dengan catatan bahwa pelanggaran tersebut digolongkan sebagai pelanggaran administratif".

Memasuki era liberalisasi pasar kerja bebas, mobilitas tenaga kerja antar negara cenderung meningkat ditandai dengan adanya "request" dan "offer" dari negara anggota WTO kepada Indonesia yang meminta Indonesia, membuka kesempatan terhadap tenaga kerja profesional asing untuk dapat bekerja di Indonesia. Kebijakan ketenagakerjaan termasuk kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam menyikapi pada perubahan" multi dimensional tersebut harus tetap mengaruh pada prinsip selektivitas dan satu pintu (*one gate policy*), sehingga kepentingan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dapat terlaksana tanpa mengurangi prinsip globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan bergulirnya otonomi daerah, banyak daerah kabupaten yang Perda-nya yang mengatur ketenagakerjaan khususnya penggunaan TKA tidak sejalan dengan peraturan per undangan-undangan yang lebih tinggi. Kondisi demikian tidak menguntungkan bagi kepentingan iklim investasi keamanan pasar kerja dan keamanan negara dalam negeri. Fungsi lembaga keimigrasian dalam hal pengawasan terhadap keberadaan orang asing khususnya tenaga kerja asing menjadi sangat penting.

Dalam mempekerjakan tenaga asing, harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu sesuai Pasal 42 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Prosedur pengajuan ijin TKA kadang-kadang rumit dan berbelit-belit. Hal ini tidak sejalan dengan konsep GATS yang dalam ketentuannya salah satu pasalnya disebutkan untuk tidak melakukan hambatan dalam masuknya TKA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan-peraturan perundangan tentang TKA dari segi pengawasan terutama di Papua keberadaan UU 13 Tahun 2003 dengan keberadaan GATS di era liberalisasi pasar kerja bebas.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan terhadap peraturan "perundangan-undangan" dan yurisprudensi. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diinventarisasi dan diidentifikasi untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan sistematis terhadap bahan hukum, baik primer maupun sekunder.

UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, yaitu dengan penetapan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan terhadap arus keluar masuknya orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional. Ketentuan tentang segala hal yang menyangkut imigrasi di negara kita diatur oleh direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Departemen Kehakiman. Masalah perizinan penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 Tahun 1990, dimana perizinan dilakukan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Departemen Teknis Perizinan ini terkesan rumit karena harus melewati beberapa meja sehingga memungkinkan sekali terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme. Salah satu alternatif untuk mengatasi rumitnya perizinan tersebut adalah dengan pelayanan satu atap. Keputusan Menaker RI No. 291/MEN/1991 hanya membahas masalah tenaga kerja dalam lingkup wilayah timur Indonesia. Pernyataan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja sangat bertolak belakang dengan substansi dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 9 tahun 1992.

## SUMMARY

### COORDINATION FOR FOREIGN MANPOWER IN INDONESIA

BY : MARGARETH ROBIN

The immigration's service and supervision are based on the selective principles. It means only foreigners who are able to give benefit for the people of the republic Indonesia, do not endanger the public order not the unity of the nation permitted to enter the jurisdiction of the Republic of Indonesia. the immigration supervision consists of administrative and criminal law enforcement. The targets of the supervision are foreigner whether or not a license immigration owner, started when he enters, stays and or will have the jurisdiction of the republic of Indonesia immigration law. The violation is classified as administration wrong.

Entering into the free market era, inter-state workers mobility tends to increase. It is marked by the existence of "request" and "offer" from the WTO's member states to Indonesia to provide opportunity for foreign professional worker to be able to work here. The national labor policy which includes the uses of foreign workers should be in keeping with the selective principles and the one gate policy. Its purposes is to protect the interest of domestic workers for equal opportunity to work with out affecting the global interest and the implementation of local autonomy. In the era of local autonomy, many local governments promulgate local regulations on labor provisions, especially for foreign workers, which are inconsistent with the higher law, this condition is negative for the importance of investment climate. Thus, the role of immigration institution in case of supervision for the existence of foreigners, especially foreign workers, in Indonesia is very important.

In case of using foreign workers, there is legal obligation to submit a permission before according to article 42 of law no. 13, 2003. unfortunately the procedure for getting a permission for foreign workers is sometimes not simple and complicated. This situation, however, is not in line with the GATS principle which one of its provision stipulated that no restriction for foreign workers to enter into the jurisdiction of the member state.

The purposes of this research is to analyze the regulation of foreign workers. The supervision aspect is its main focus in according with law No. 13, 2003 and the GATS. The location of the research is specified in Papua. This legal research is carried out by statute approach. The legal material of the research are primary and secondary legal materials.

Law No. 9, 1992 on immigration is to secure benefit and to protect various national interest by prescribing policy, service and supervision system for people who

are in - and - out to or from Indonesia's jurisdiction. The provision concerning immigration in Indonesia is arranged by directorate general of immigration under.

The department of justice. The issue of permission on using foreign workers is further regulated by the minister of labor decision No. 3, 1990. according to this decision, a permission procedurally is given by the investment coordination agency (BKPM). The procedure is seem complicated because they have to pass several tabels so that it is very possible occurs collution, corruption and nepotism one of the alternative to address this problem is by one - roof service.

The minister of labor decision No. 291, 1991 only relates the workers issue in east Indonesia area. The provision of this decision is inconsistent with the provision of law No. 13, 2003 and law No. 9, 1992.

## ABSTRACT

### LEGAL SUPERVISION FOR FOREIGN WORKERS IN INDONESIA

BY : MARGARETH ROBIN

Legal supervision for foreign workers in Indonesia affects the Indonesia role in the free market era. Labor policies regulated by Law no. 13, 2003, Law No. 9, 1992 and other implementing regulations are directed to protect foreign workers without reducing global interest and principles of local autonomy. In 1994, the government of the Republic of Indonesia ratified the WTO which includes the general agreement on trade and services (GATS).

This research was undertaken by statute approach. It analyzed the legal materials concerning foreign workers placement in Indonesia and their supervision system. According to the research, there is inconsistency between the provisions of the Indonesian law and the GATS ones.

Keywords :

1. Foreign workers in Indonesia
2. Supervision
3. GATS